

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Putusan hakim terhadap perkara impor gula pascapemberian abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong tetap didasarkan pada fakta persidangan, alat bukti, serta peran masing-masing terdakwa. Pemberian abolisi tidak menentukan benar atau salahnya perbuatan penerima abolisi, melainkan hanya menghentikan proses penuntutan terhadap yang bersangkutan, sehingga tidak mempengaruhi pemeriksaan dan putusan hakim terhadap terdakwa lainnya.
2. Pertimbangan hakim terhadap terdakwa lain tetap dilakukan secara mandiri sesuai dengan keterlibatan masing-masing pihak. Pemberian abolisi bersifat spesifik dan hanya berlaku bagi pihak yang secara khusus disebut dalam keputusan presiden, sehingga tidak mempengaruhi pemeriksaan dan putusan terhadap terdakwa lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa hakim tetap bersikap konsisten dan independen dalam menjalankan fungsi peradilan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dalam praktik peradilan ke depan, putusan dalam perkara impor gula yang berkaitan dengan pemberian abolisi terhadap Thomas Trikasih Lembong dapat dijadikan rujukan dalam menangani perkara serupa. Selain itu, Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan penyusunan pedoman atau peraturan yang mengatur kedudukan pemberian abolisi dalam perkara yang melibatkan lebih dari satu pelaku, sehingga hakim memiliki acuan yang lebih jelas dalam memeriksa dan memutus perkara yang berkaitan dengan pemberian abolisi di masa mendatang.
2. Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara yang melibatkan lebih dari satu terdakwa, khususnya dalam konteks pemberian abolisi kepada salah satu pihak, perlu tetap mempertahankan konsistensi dan independensi dalam menilai peran serta masing-masing terdakwa. Selain itu, hakim juga perlu menguraikan pertimbangan hukum secara lebih menyeluruh dan sistematis, khususnya terkait hubungan antara pelaku utama dan pelaku turut serta, agar putusan yang dihasilkan tidak hanya mencerminkan keadilan, tetapi juga memberikan kepastian hukum dan menghindari potensi perdebatan di kemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ahmad Hajar Zunaidi, 2022, *Asas Kelayakan Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Ringan*, Kencana, Jakarta.
- Amad Sudiro, dkk. 2025. *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Diva Pustaka, Purbalingga.
- Chidir Ali, 1985, *Responsi Hukum Pidana Penyertaan Dan Gabungan Tindak Pidana*, Armico, Bandung.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar, 2024, *METODE PENELITIAN HUKUM Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung.
- Febby Mutiara Nelson, 2020, *Sistem Peradilan Pidana Dan Penanggulangan Korupsi Di Indonesia*, Rajawali Pers, Depok.
- Kasmanto Rinaldi, dkk, 2023, *Pendidikan Anti Korupsi*, Cendekia Mulia Mandiri, Batam.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum.*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Mataram.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Cet.12, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2022, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Maha Karya Pustaka, Yogyakarta.
- Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan 1, Publika Global Media, Kota Yogyakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.
- Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1954 tentang Amnesti dan Abolisi.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2025 tentang Pemberian Abolisi.

Keputusan Menteri Perdagangan dan Perindustrian Nomor 527/MPP/Kep/2004 tentang Ketentuan Impor Gula.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 117/M-DAG/PER/12/2015 tentang Ketentuan Impor Gula.

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1/1955/M.Pid.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 21P/HUM/2017.

Skripsi

Dea Ratna Vionita, 2025, Analisis Mengenai Penerapan Dissenting Opinion Terhadap Putusan Bebas Oleh Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Study Kasus Perkara Nomor : 1555K/Pid.Sus/2019), Skripsi, Universitas Nasional.

Frisca Regina Ferreira Lay, 2024, “Disparitas Putusan Hakim Dalam Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana Korupsi Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2018/PN Mam dan Putusan Nomor 33/Pid.TPK/2020/PT Mks)”, Skripsi, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Luthfi Chandra Fairuz, 2023, “Analisis Pertimbangan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Koperasi Tambang Di Bintan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 4858 K/Pid.Sus/2021)”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Jurnal

Adi Kusyandi dan Saefullah Yamin, 2023, “Disparitas Putusan Hakim Pidana Berkualitas Yang Mencerminkan Rasa Keadilan Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Jurnal Yustisia*, Vol9/No-1/April/2023, Faculty Of Law Universitas Wiralodra. <https://doi.org/10.31943/yustitia.v9i1.173>

Ahmad Taufik, Dzulfikar Rodafi, dan Humaidi, 2024, “Analisis Konsistensi Hakim Pengadilan Agama Malang Dalam Menerapkan Asas Mempersukar Perceraian Berdasarkan SEMA No. 1 Tahun 2022 (Studi Putusan Nomor. 1672/Pdt.G/2023/PA.Mlg)”, *Hikmatina: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol6/No-1/2024, Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang.

Alivia Reva Andiyani dan Ismunarno, 2021, “Perbandingan Hukum Jenis Perbuatan Yang Dilarang Dalam Tindak Pidana Korupsi Antara Indonesia Dan Singapura”, *Recidive: Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol10/No-1/Jan-Apr/2021, Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. <https://doi.org/10.20961/recidive.v10i1.58846>

Andika Rayhan Putra Herang, 2025, “Analisis Unsur Perbuatan Pidana Dalam Kasus Korupsi Impor Gula Mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol8/Issue 2/2025, Universitas Negeri Gorontalo. <https://doi.org/10.38043/jah.v8i2.7028>

Angel Nikhio, Cindy Sekarwati Amalia dan Zain Irawan, 2023, “Penegakan hukum di Indonesia: Peran Pemerintah dalam Mewujudkannya”, *Indigenous Knowledge*, Vol2/No-6/December/2023, Universitas Sebelas Maret.

Apit Farid dan Ramdani Wahyu Sururie, 2024, “Kepastian Dan Keadilan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Harta Bersama”, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam*, Vol5/No-2/September/2024, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung. doi: 10.15575/as.v5i2.34307

Ari Meilando, Mohamad Ismed, dan Basuki, 2025, “Kepastian Hukum Terhadap Diversi Dalam Tindak Pidana Penyertaan Deelneming) Pada Tingkat Penuntutan”, *Cendekia: Jurnal Penelitian dan Pengkajian Ilmiah*, Vol2/No-2/Februari/2025, LPP Manggala Institute. <https://doi.org/10.62335/cendekia.v2i2.960>

- Bagus Satrio Utomo Prawiraharjo dan Adam Suwahyo, 2025, "Pertanggungjawaban Pidana Merugikan Keuangan Negara Tanpa Pengayaan Pribadi: Kajian Putusan Tipikor No. 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN.Jkt.Pst", *Juril: Jurnal Itineris Legis*, Vol1/No-1/Agustus/2025, LPPMK – Universitas Muhammadiyah Cileungsi. DOI 10.37373/jh.v1i1.1895
- Cahya Palsari, 2021, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan Dan Fungsi Ilmu Hukum Sebagai Dasar Fundamental Dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan", *Jurnal Komunitas Yustisia*, Vol4/No-3/November/2021, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pendidikan Ganesha. DOI:[10.23887/jatayu.v4i3.43191](https://doi.org/10.23887/jatayu.v4i3.43191)
- Devica Anjelina Purba, Made Sugi Hartono, dan Muhamad Jodi Setianto, 2023, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Dalam Penerapan Ketentuan Pasal Penyertaan Pada Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2018/PNSrg)", *Jurnal Gender Dan Hak Asasi Manusia*, Vol1/No-1/Maret/2023, Universitas Pendidikan Ganesha.
- Diah Turis Kaemirawati dan Bayu Hidayah, 2025, "Pengaruh Vonis Bebas Ronald Tannur Dalam Perspektif Sosiologi Hukum Terhadap Kepercayaan Publik", *Binamulia Hukum*, Vol14/No-1/Maret/2025, Fakultas Hukum Universitas Krisnadwipayna. <https://doi.org/10.37893/jbh.v14i1.941>
- Dwi Nissa Kamalia Putri dan Ahmad Izzuddin, 2022, "Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Singaraja Dalam Penetapan Nafkah 'Iddah, Nafkah Mut'ah Dan Eksekusinya Pada Putusa Verstek Cerai Gugat", *SAKINA: JOURNAL OF FAMILY STUDIES*, Vol6/No-4/April/2022, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. <https://doi.org/10.18860/jfs.v7i1.2518>
- Dwi Ratna Sari, 2026, "Analisis Yuridis Putusan Hakim Pengadilan Negeri Jambi Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Nomor 42/Pid.Sus/2024/PN JMB, Skripsi, Universitas Batanghari.
- Eling Sinta dan Ade Kosasih, 2025, "Amnesti Dan Abolisi Dalam Sistem Hukum Tata Negara Indonesia: Kajian Kritis Atas Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong", *Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan dan Politik Islam*, Vol5/No-2/Desember/2025, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. <https://doi.org/10.14421/staatsrecht.v5i2.4471>
- Gunawan Hi Abas, 2025, "Tinjauan Yuridis terhadap Kewenangan Presiden dalam Pemberian Amnesti dan Abolisi: Antara Hukum dan Kepentingan Politik", *JIMU: Jurnal Ilmiah Multi Disiplin*, Vol04/No-04/September/2025.
- Ida Mursidah, 2024, "Kekuatan Mengikat Putusan Pengadilan Sebagai Preseden: Antara Teori Dan Praktik", *YUDHISTIRA : Jurnal Yurisprudensi, Hukum dan Peradilan*, Vol2/No-3/September/2024, Kalimasada Group. <https://doi.org/10.59966/yudhistira.v2i3.1669>

- Muhammad Fadhil Andika Ramadhan dan Rugun Romaida Hutabarat, 2021, "Analisis Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku yang Diduga Turut Melakukan (*Medepleger*) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Kasus Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Putusan Nomor: 22/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Jkt.Pst", *Jurnal Hukum Adigama*, Vol4/No-2/Desember/2021, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara. <https://doi.org/10.24912/adigama.v4i2.17091>
- Muhammad Syafri Bahtra Holle, Sherly Adam, dan Yanti Amelia Lewerissa, 2025, "Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Putusan Perkara Tindak Pidana Penganiayaan", *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol10/No-4/April/2025, Syntax Corporation. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v10i4.58207>
- Muntaha, Hanny Amelia, dan Novi E Baskoro, 2021, "Tinjauan Hukum Terhadap Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia", *Jurnal Pemuliaan Hukum*, Vol4/No-1/April/2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara (UNINUS). <https://doi.org/10.30999/jph.v4i1.1448>
- Nathanael Kenneth, 2024, "Maraknya Kasus Korupsi Di Indonesia Dari Tahun Ke Tahun", *JLEB: Journal of Law Education and Business*, Vol2/No-1/April/2024, Rayyan Dwi Bharata. <https://doi.org/10.57235/jleb.v2i1.1645>
- Nuraida Fitrihabib, Rafikah, dan Ardian Kurniawan, 2022, "Kepastian Hukum, Kemanfaatan dan Keadilan Pemidanaan Kejahatan Asal Usul Perkawinan (Analisis Putusan No. 387/Pid.B/2021/PN.Jmb)", *Al-Jinayah : Jurnal Hukum Pidana Islam*, Vol8/No-1/2022/Juni/2022, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. <https://doi.org/10.15642/aj.2022.8.1.1-13>
- Putu Ari Sugiarto, Deli Bunga Saravistha, dan Ni Luh Ketut Dewi Yani Putri, 2023, "Hermeneutika Majelis Hakim Terkait Ratio Decidendi (Studi Kasus Putusan Nomor 172/Pdt/2019/PT DPS)", *Al-Dalil Jurnal Ilmu Sosial, Politik, dan Hukum*, Vol1/No-2/Juni/2023, Indra Institute Research & Publication. <https://doi.org/10.58707/aldalil.v1i2.476>
- Ridwan Syaidi, 2025, "Implementasi Kewenangan Amnesti Dan Abolisi Presiden Dalam Kasus Hasto Kristiyanto Dan Tom Lembong", *Lex Jurnalica*, Vol22/No-2/Agustus/2025, Lembaga Penerbitan Universitas Esa Unggul. <https://doi.org/10.47007/lj.v22i2.9847>
- Suryo Cipto Leksono, dkk., 2025, "Politik Hukum dan Korupsi: Satu Kajian Kritis Terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana", *CENDEKIA: Jurnal Hukum, Sosial & Humaniora*, Vol3/No-2/April/2025, Lembaga Pusat Studi Sosial Dan Humaniora (LPS2H). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15093292>
- Tri Dian Aprilsesa dkk., 2023, "Tinjauan Pelaksanaan Pemberian Upah Pada Buruh Dibawah Upah Minimum", *AL MANHAJ: Jurnal Hukum Dan*

Pranata Sosial Islam, Vol5/No-1/Mei/2023, Institut Agama Islam Sunan Giri (INSURI) Ponorogo. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.1997>

Yuspar dan Fahmiron, 2025, “Abolisi Dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Tom Lembong”, *Jurnal Fakta Hukum*, Vol4/No-01/September/2025, LPPM Universitas Pertiba Pangkalpinang. <https://doi.org/10.58819/jfh.v4i1.176>

Website

Adhi Wicaksono, Isi Lengkap Keppres Abolisi Prabowo Untuk Tom Lembong, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20250804205203-12-1258662/isi-lengkap-keppres-abolisi-prabowo-untuk-tom-lembong>, diakses 26 Oktober 2025.

Amelia Rahima Sari, Mengapa Abolisi terhadap Tom Lembong Tak Berlaku untuk Terdakwa Lain, <https://www.tempo.co/hukum/mengapa-abolisi-terhadap-tom-lembong-tak-berlaku-untuk-terdakwa-lain-2084481>, diakses 9 Maret 2026.

Anshary Madya Sukma, Tok! 9 Bos Perusahaan Swasta Divonis 4 Tahun Penjara Di Kasus Impor Gula Tom Lembong, https://kabar24.bisnis.com/read/20251030/16/1924691/tok-9-bos-perusahaan-swasta-divonis-4-tahun-penjara-di-kasus-impor-gula-tom-lembong#goog_rewarded, Diakses 09 Desember 2025.

Ariq Faiq Muyassar, Ketiadaan Mens Rea dalam Kasus Thomas Lembong: Pelanggaran Administratif atau Tindak Pidana Korupsi?, <https://www.kompasiana.com/ariqfaiq9614/68877f3534777c3c6e7d3cb3/ketiadaan-mens-rea-dalam-kasus-thomas-lembong-pelanggaran-administratif-atau-tindak-pidana-korupsi>, diakses 10 Maret 2026.

Hendrik Khoirul Muhid, Mahfud MD dan Novel Baswedan Kupas Putusan Hakim Kasus Tom Lembong, <https://www.tempo.co/hukum/mahfud-md-dan-novel-baswedan-kupas-putusan-hakim-kasus-tom-lembong-2051033>, diakses 10 Maret 2026.

Hendrik Khoirul Muhid dan Amelia Rahima Sari, Fakta-Fakta Kasus Dugaan Korupsi Impor Gula Tom Lembong: 9 Tersangka Baru hingga Rentetan Waktu Kongkalikong, <https://www.tempo.co/hukum/-fakta-fakta-kasus-dugaan-korupsi-impor-gula-tom-lembong-9-tersangka-baru-hingga-rentetan-waktu-kongkalikong--1197094>, diakses 26 Oktober 2025.

Hukum Online, Presiden ‘Putihkan’ Tom Lembong dan Hasto Kristianto Melalui Abolisi dan Amnesti, <https://www.hukumonline.com/berita/a/presiden-putihkan-tom-lembong-dan-hasto-kristianto-melalui-abolisi-dan-amnesti-lt688c10b36a053/?page=1>, diakses 23 Februari 2026.

Hukum Online, PSHK: Abolisi dan Amnesti Tom Lembong-Hasto Kristiyanto Preseden Buruk Penegakan Hukum Kasus Korupsi, <https://www.hukumonline.com/berita/a/pshk--abolisi-dan-amnesti-tom-lembong-hasto-kristiyanto-preseden-buruk-penegakan-hukum-kasus-korupsi-lt688ef44b2cfa7/> , diakses 23 Februari 2026.

METRO TV, BREAKING NEWS – KONPERS DPR & MENHUM: PEMBERIAN ABOLISI TOM LEMBONG & AMNESTI HASTO KRISTIYANTO, YouTube, https://www.youtube.com/live/XUn4NSw-D-g?si=RGciajLN5z_mkcFf, diakses 9 Maret 2026.

Novianti Setuningsih, Apa Itu Abolisi yang Diberikan kepada Tom Lembong dan Bagaimana Prosedurnya?, <https://nasional.kompas.com/read/2025/07/31/21180631/apa-itu-abolisi-yang-diberikan-kepada-tom-lembong-dan-bagaimana-prosedurnya?page=all>, diakses 26 Oktober 2025.

Raden Putri Alpadillah Ginanjar, Bagaimana Status Tersangka Lain dalam Kasus Korupsi Impor Gula setelah Tom Lembong Bebas?, <https://www.tempo.co/hukum/bagaimana-status-tersangka-lain-dalam-kasus-korupsi-impor-gula-setelah-tom-lembong-bebas--2054636>, diakses 27 Oktober 2025.

Redaksi, Majelis Hakim Akan Bacakan Vonis 9 Pengusaha Kasus Impor Gula Pada 30 Oktober, <https://www.hariansib.com/nasional/434556/majelis-hakim-akan-bacakan-vonis-9-pengusaha-kasus-impor-gula-pada-30-oktober/all/>, Diakses 09 Desember 2025.

Shela Octavia dan Ardito Ramadhan, Nasib Terdakwa Kasus Impor Gula, Tetap Diproses Hukum Saat Tom Lembong Dapat Abolisi, <https://nasional.kompas.com/read/2025/08/06/08140881/nasib-terdakwa-kasus-impor-gula-tetap-diproses-hukum-saat-tom-lembong-dapat?page=all>, diakses 27 Oktober 2025.

Shela Octavia dan Danu Damarjati, 10 Pengusaha Gula Divonis Bui Usai Tom Lembong Bebas Via Jalur Abolisi, <https://nasional.kompas.com/read/2025/10/31/10593771/10-pengusaha-gula-divonis-bui-usai-tom-lembong-bebas-via-jalur-abolisi?page=all>, Diakses 09 Desember 2025.

Warta, Hotman Paris Desak Abolisi Untuk Terdakwa Korupsi Impor Gula Lainnya, <https://bisnis-surabaya.com/2025/08/02/hotman-paris-desak-abolisi-untuk-terdakwa-korupsi-impor-gula-lainnya/>, Diakses 09 Desember 2022.

Sumber Hukum Lainnya

Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 139/PIMP/IV/2024–2025 tentang Pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia terhadap Permohonan Abolisi untuk Thomas Trikasih Lembong.

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi, 2022.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst.

Surat Dakwaan Nomor Register Perkara PDS-06/M.1.10/Ft.1/02/2025.

Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-43/Pres/07/2025 tentang Permintaan Pertimbangan DPR RI terhadap Pemberian Abolisi kepada Thomas Trikasih Lembong, 2025.

